



PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DI SMP ISLAM TERPADU BINA INSAN PALU

Rismawati S^{1(*)}, Adhriansyah A. Lasawali², Eka Firmansyah³, Andi Anirah⁴

UIN Datokarama Palu, Indonesia¹⁴

Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia²³

rismawatialifah@gmail.com¹, adhriansyah@unismuhpalu.ac.id², ekafirmansyah689@gmail.com³, andianirah@uindatokarama.ac.id⁴

Abstract

Received: 15 Agustus 2025
Revised: 25 Agustus 2025
Accepted: 25 Agustus 2025

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta menganalisis secara mendalam problematika penerapan Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan, sebuah sekolah swasta di Kota Palu yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan kepala sekolah, guru mata pelajaran inti, dan staf kurikulum yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan relevansi pengalaman. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode tematik yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian mengungkap tiga hambatan utama: (1) rendahnya pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan pelaksanaan proyek Profil Pelajar Pancasila; (2) lemahnya dukungan kelembagaan, termasuk ketiadaan tim kurikulum internal dan minimnya pemanfaatan teknologi pembelajaran; serta (3) terbatasnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan yang relevan dengan konteks sekolah. Meskipun terdapat inisiatif guru untuk beradaptasi melalui pembelajaran mandiri dan kolaborasi internal, upaya tersebut masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem sekolah. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi peningkatan kapasitas guru, penguatan struktur kelembagaan, dan pengembangan model pelatihan berbasis komunitas agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan kontekstual, efektif, dan berkelanjutan.

Keywords: Problematika; Implementasi; Kurikulum Merdeka

(*) Corresponding Author: S, rismawatialifah@gmail.com

How to Cite: S, R., Lasawali, A. A., Firmansyah, E., & Anirah, A. (2025). PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DI SMP ISLAM TERPADU BINA INSAN PALU. *Research and Development Journal of Education*, 11(2), 760-770

INTRODUCTION

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul di tengah era globalisasi dan disrupsi teknologi. Globalisasi mempercepat arus informasi, perdagangan, serta mobilitas tenaga kerja yang menuntut individu memiliki kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi (Thornhill-Miller et al., 2023). Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia merancang Kurikulum Merdeka sebagai salah satu upaya pembaruan sistem pendidikan nasional yang responsif terhadap perubahan zaman. Kurikulum ini bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual dan diferensiasi (Kemendikbudristek, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan

paradigma konstruktivistik dalam pendidikan, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui interaksi aktif dengan lingkungan sosial dan kulturalnya (Do et al., 2023). Selain itu, Kurikulum Merdeka juga mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam melalui asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi dan gaya belajarnya masing-masing. Dalam konteks ini, guru tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga fasilitator yang membimbing proses belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi langkah strategis dalam membangun generasi Indonesia yang adaptif, kompeten, dan berkarakter.

Secara filosofis, Kurikulum Merdeka berakar pada pendekatan konstruktivisme, sebuah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru ke peserta didik, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Menurut perspektif konstruktivistik terkini, pembelajaran bukanlah sekadar penerimaan pasif terhadap informasi, melainkan proses aktif membangun makna melalui pengalaman nyata dan dialog reflektif dengan lingkungan sosial (Alqahtani et al., 2023). Konsep ini menuntut adanya keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pemahaman, yang menjadi dasar penting dalam desain Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, berbasis proyek, dan kontekstual. Teori konstruktivisme ini diperkuat oleh pendekatan sosiokultural yang menegaskan bahwa proses kognitif terbentuk melalui interaksi sosial dan penggunaan bahasa dalam konteks budaya; peran guru bergeser menjadi fasilitator yang mendesain dukungan (*scaffolding*) untuk mendorong zona perkembangan proksimal siswa (Masava et al., 2022). Hal ini sejalan pula dengan pernyataan Lai yang menyatakan bahwa teori konstruktivisme diperkuat oleh perspektif sosiokultural yang menekankan interaksi sosial dan bahasa sebagai penggerak perkembangan kognitif; ZPD dan *scaffolding* menjelaskan bagaimana guru '*more knowledgeable other*' mendukung siswa melampaui kemampuan mandiri mereka (Lai, 2023).

Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan aktivitas pembelajaran yang variatif dan adaptif untuk menanggapi perbedaan profil siswa, sebuah pendekatan yang mirip dengan penerapan ide multiple intelligences dalam kelas, misalnya kegiatan linguistik, musikal, kinestetik, interpersonal, sehingga siswa berkembang sesuai potensi dan gaya belajarnya. Penekanan ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik secara individual. Namun dalam implementasinya, berbagai problematika muncul di tingkat satuan pendidikan, terutama pada sekolah swasta kecil di daerah berkembang seperti Kota Palu. Studi oleh Sulistyowati dan Wahyuni menunjukkan bahwa banyak guru belum memahami secara utuh prinsip Kurikulum Merdeka, terutama dalam menyusun asesmen formatif dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi (Sulistyowati & Wahyuni, 2023). Hal serupa ditemukan oleh Rahman dalam penelitiannya di Sulawesi Tengah, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Rahman et al, 2023).

SMP Islam Terpadu Bina Insan Kota Palu sebagai salah satu sekolah swasta menengah menunjukkan kondisi yang representatif. Berdasarkan observasi awal peneliti, banyak guru belum mengikuti pelatihan intensif mengenai Kurikulum Merdeka, sehingga praktik pembelajaran masih bergantung pada metode lama dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan diferensiasi. Temuan ini didukung oleh Alfina dan Nur yang mencatat bahwa guru-guru di sekolah swasta memiliki keterbatasan dalam mengenali

profil belajar peserta didik (Alfina & Nur, 2022). Tenriola dalam penelitiannya di Kabupaten Bantaeng menekankan pentingnya perencanaan matang, pemilihan alat ajar yang sesuai, dan strategi asesmen yang tepat dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Selain itu, keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada intensitas pelatihan dan pendampingan guru, yang masih minim di sekolah-sekolah pinggiran (Tenriola et al., 2022).

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, terutama di sekolah swasta yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dalam hasil penelitiannya, Awaluddin menegaskan bahwa dukungan kepala sekolah berperan penting dalam membangun budaya belajar yang adaptif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik nilai-nilai inti yang ditekankan dalam Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang mendorong inovasi di tingkat sekolah. Tanpa kepemimpinan yang visioner dan transformatif, adaptasi terhadap kurikulum baru cenderung stagnan dan bersifat simbolik semata. Di sisi lain, pengawasan dan pendampingan yang konsisten dari dinas pendidikan, khususnya sekolah swasta kecil dan menengah kesulitan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas refleksi dan perbaikan proses pembelajaran di sekolah tersebut (Awaluddin et al., 2023). Oleh karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kesiapan guru dan perangkat kurikulum, tetapi juga pada sinergi antara kepemimpinan internal sekolah dan sistem dukungan eksternal dari lembaga pengawas pendidikan.

SMP Islam Terpadu Bina Insan sebagai lembaga berbasis nilai-nilai Islam dan multikultural menghadapi tantangan tambahan dalam menyeimbangkan antara tuntutan kurikulum nasional dan karakteristik lokal. Studi oleh Samad, Hamzah dan Musdalifah menunjukkan bahwa peserta didik di sekolah swasta seringkali belum terbiasa dengan model pembelajaran berbasis proyek yang menuntut kemandirian tinggi. Di samping itu, keberadaan komunitas belajar seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) sangat penting untuk mendukung pertukaran praktik baik antar pendidik (Samad & Hamzah, 2023; Musdalifah, 2023).

Keterbatasan studi yang menyoroti secara mendalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah swasta kecil seperti SMP Islam Terpadu Bina Insan memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar kajian masih terfokus pada sekolah negeri atau sekolah unggulan yang relatif siap dari segi sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Sementara itu, realitas lapangan menunjukkan bahwa sekolah swasta kecil, terutama di daerah berkembang, justru menghadapi tantangan implementasi yang jauh lebih kompleks, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, kurangnya fasilitas penunjang, hingga minimnya pelatihan kurikulum (Rahman et al., 2023; Yuliana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa narasi umum dalam studi-studi pendidikan sering kali mengabaikan kompleksitas lokal dan keberagaman konteks satuan pendidikan swasta kecil. Kajian dan studi kasus terkini menekankan pentingnya riset peka-konteks yang tidak sekadar mereplikasi model sekolah elite atau urban (Holmes et al., 2021). Oleh karena itu, studi terhadap sekolah seperti SMP Islam Terpadu Bina Insan menjadi penting untuk memperluas pemahaman akademik terhadap dinamika implementasi Kurikulum Merdeka dalam realitas yang kurang ideal, sekaligus menjadi kontribusi terhadap kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis keadilan.

Keterbatasan studi yang menyoroti secara mendalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah swasta kecil seperti SMP Islam Terpadu Bina Insan memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian. Sebagian besar kajian masih terfokus pada sekolah negeri

atau sekolah unggulan yang relatif siap dari segi SDM dan infrastruktur. Padahal, realitas lapangan menunjukkan bahwa sekolah swasta kecil justru menghadapi tantangan lebih kompleks.

Dalam konteks global, berbagai literatur internasional memberikan kontribusi penting dalam memperkaya perspektif pengembangan kurikulum nasional seperti Kurikulum Merdeka. Twining menekankan bahwa kolaborasi antara guru dan pemangku kebijakan merupakan elemen fundamental dalam merancang kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui pendekatan kolaboratif ini, guru tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga berperan sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan pendidikan (Twining et al., 2021). Selaras dengan itu, model TPACK menekankan bahwa desain pembelajaran era digital harus mengintegrasikan secara harmonis tiga komponen utama yaitu konten, pedagogi, dan teknologi; tanpa pemahaman yang seimbang, guru kesulitan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna (Kholid et al., 2023). Lebih lanjut, Valiente Bermejo menyoroti pentingnya kemitraan antara universitas dan sekolah dalam proses perancangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat relevansi kurikulum dengan konteks komunitas, tetapi juga meningkatkan kapasitas institusi pendidikan melalui proses dialogis yang partisipatif dan berbasis riset (Bermejo et al., 2022). Ketiga pandangan ini memperlihatkan bahwa perancangan kurikulum yang transformatif membutuhkan sinergi antarlembaga, penguasaan multidimensi kompetensi oleh guru, serta keberpihakan terhadap konteks lokal.

Dari sisi teori pembelajaran, pendekatan konstruktivisme tidak hanya menekankan pentingnya peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan, tetapi juga menyoroti dimensi sosial dan institusional dalam proses pendidikan. Segal, dalam kerangka konstruktivisme radikal, menegaskan bahwa realitas pendidikan bukanlah objektif dan tunggal, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibangun melalui dialog terbuka antar guru, siswa, orang tua, dan pembuat kebijakan (Vaičiūnienė & Kazlauskienė, 2022). Dalam hal ini, kebijakan pendidikan tidak seharusnya bersifat top down semata, melainkan lahir dari proses interaksi dan negosiasi di tingkat akar rumput. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan konstruktivisme sosial bahwa struktur sosial dan norma bersama memiliki pengaruh kuat terhadap cara institusi menanggapi dan mengadaptasi kebijakan, hal ini juga ditunjukkan dalam studi yang menyoroti peran guru sebagai agen perubahan sosial dalam kerangka normatif pendidikan (Butera et al., 2021). Dalam konteks ini, implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu menunjukkan relevansi tinggi, karena struktur sosial sekolah tersebut ditandai oleh nilai-nilai keagamaan dan komunitas yang kuat, sehingga pendekatan yang bersifat partisipatif dan kontekstual lebih sesuai daripada penerapan model seragam dari pusat. Sekolah dengan karakter religius seperti SMP Islam Terpadu Bina Insan memiliki dinamika internal yang membentuk cara guru dan peserta didik memaknai kurikulum, yang menjadikan pendekatan konstruktivis sangat penting untuk diperhatikan dalam kebijakan pendidikan di tingkat mikro.

Novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah swasta di daerah berkembang, khususnya SMP Islam Terpadu Bina Insan Kota Palu, yang masih jarang dibahas dalam literatur. Penelitian ini menggabungkan pendekatan konstruktivisme, perspektif sosiokultural, dan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk memahami tantangan implementasi pada konteks religius multikultural dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor kunci seperti kepemimpinan sekolah, kapasitas guru, dukungan kelembagaan, dan peran komunitas, serta menawarkan rekomendasi berbasis realitas lapangan yang relevan bagi sekolah swasta kecil di wilayah berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa Kurikulum Merdeka membawa visi pendidikan yang progresif, tetapi implementasinya menghadapi problematika struktural dan kultural di lapangan. Keterbatasan pelatihan, lemahnya kepemimpinan pembelajaran, rendahnya literasi digital guru, serta absennya pendampingan sistematis menjadi tantangan utama. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam problematika penerapan Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan Kota Palu, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi berbasis konteks lokal yang berguna bagi pengambil kebijakan, pendidik, dan institusi pendidikan swasta serupa.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Partisipan terdiri dari kepala sekolah, tiga guru mata pelajaran inti, dan satu staf kurikulum yang dipilih secara purposive sampling untuk mendapatkan informasi mendalam dan relevan mengenai pelaksanaan kurikulum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pada aktivitas pembelajaran dan manajerial, serta analisis dokumen seperti perangkat ajar, catatan rapat kurikulum, dan kebijakan internal sekolah. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking kepada partisipan. Penelitian ini fokus pada proses implementasi kurikulum di tingkat sekolah dan tidak melibatkan evaluasi kuantitatif terhadap hasil belajar peserta didik.

RESULTS & DISCUSSION

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut mencakup aspek kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip kurikulum merdeka, serta belum optimalnya kesiapan kelembagaan. Secara umum, kendala yang muncul dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tema besar: yang Pertama adalah rendahnya pemahaman guru terkait prinsip dasar Kurikulum Merdeka, yang kedua lemahnya dukungan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum, dan yang ketiga adalah minimnya pelatihan berkelanjutan serta pendampingan teknis dari pihak yang berwenang.

Tabel 1.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu

No	Kategori Temuan	Indikator Tematik	Inti Temuan
1	Rendahnya Pemahaman Guru	a. Tidak paham diferensiasi b. Bingung asesmen formatif c. Minim proyek P5	Guru kurang paham diferensiasi, asesmen dan P5
2	Dukungan Kelembagaan	a. Tanpa tim kurikulum b. Minim teknologi c. Koordinasi lemah	Dukungan terbatas dan koordinasi lemah
3	Minim Pelatihan	a. Tidak berkelanjutan b. Tanpa komunitas c. Belum ikut pelatihan	Pelatihan minim, tanpa pendampingan

Sumber: Peneliti

1. Rendahnya Pemahaman Guru terhadap Konsep Kurikulum Merdeka

Sebagian besar guru di SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu mengungkapkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, maupun pelaksanaan proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila. Ketidaksiapan ini berdampak langsung pada rendahnya kemampuan mereka dalam mengimplementasikan konsep-konsep Kurikulum Merdeka secara efektif di kelas. Hal ini sejalan dengan temuan dari studi lain misalnya, Wijayanti dan kawan-kawan yang menemukan pemahaman guru terhadap teori konstruktivisme dalam Kurikulum Merdeka masih bervariasi dan sebagian besar hanya bersifat konseptual tanpa penerapan nyata (Wijayanti et al, 2025). Selain itu, Mayangsari bersama timnya dalam penelitian mereka di sekolah dasar, juga menunjukkan bahwa tantangan serupa muncul, yaitu kurangnya pelatihan intensif dan kesiapan teknis yang memadai untuk menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik (Mayangsari et al, 2024).

Fenomena ini tercermin pula dalam studi-studi terkini yang menunjukkan bahwa konteks lokal dan kesiapan kelembagaan sangat menentukan efektivitas implementasi kurikulum, termasuk Kurikulum Merdeka. Dalam studi rural, implementasi sering tidak berjalan optimal karena kendala kondisi sosial dan struktural (Doh Nubia & Blignaut 2024). Pada gilirannya, teori konstruktivisme sosial menggarisbawahi bahwa realitas pendidikan dibentuk melalui interaksi dan norma bersama yaitu penyesuaian kebijakan harus mempertimbangkan aspek kolaboratif dan kontekstual agar bermakna (Khalid et al. 2023). Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis praktik dan pendampingan lanjutan agar guru dapat merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, adaptif, dan bermakna.

2. Keterbatasan Dukungan Kelembagaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan, SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu belum memiliki sistem terstruktur yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Ketiadaan tim kurikulum khusus menyebabkan koordinasi antar guru menjadi sporadis, sementara dukungan teknologi pembelajaran juga tergolong minim. Fenomena ini sejalan dengan studi Sulastrri dan kawan-kawan yang mengungkap bahwa hambatan implementasi pada tingkatan sekolah terutama terjadi karena kelemahan struktur organisasi, khususnya dalam aspek dukungan administratif dan teknologi (Sulastrri, Hakpantria, & Linggi 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa perubahan kurikulum tidak cukup direspon dengan merevisi dokumen, melainkan menuntut kesiapan sistemik di tingkat institusi.

Pendekatan ini didukung oleh teori terkini mengenai *organizational readiness for change*, yang menyatakan bahwa kesiapan organisasi terdiri dari komitmen bersama terhadap perubahan dan keyakinan kolektif dalam kemampuan untuk menerapkannya (*change valence* dan *change efficacy*). Model kuantitatif modern juga telah mengembangkan skala pengukuran aspek ini dalam konteks organisasi (Albers et al., 2020). Dalam konteks SMP Islam Terpadu Bina Insan, rendahnya dukungan kelembagaan dan teknologi membatasi baik *change efficacy* maupun *change valence* guru. Padahal, kedua aspek tersebut esensial supaya guru terdorong berpartisipasi dalam transformasi kurikulum, sesuai teori yang menekankan bahwa tanpa kepemilikan dan percaya diri bersama, reformasi pendidikan cenderung stagnan.

Selain itu, dari aspek kesiapan guru juga menjadi perhatian utama. Penelitian Puspitasari dan Utami tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun guru memiliki niat untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, mereka masih mengalami kesulitan teknis dan konseptual, terutama dalam menyusun modul ajar dan melakukan asesmen formatif

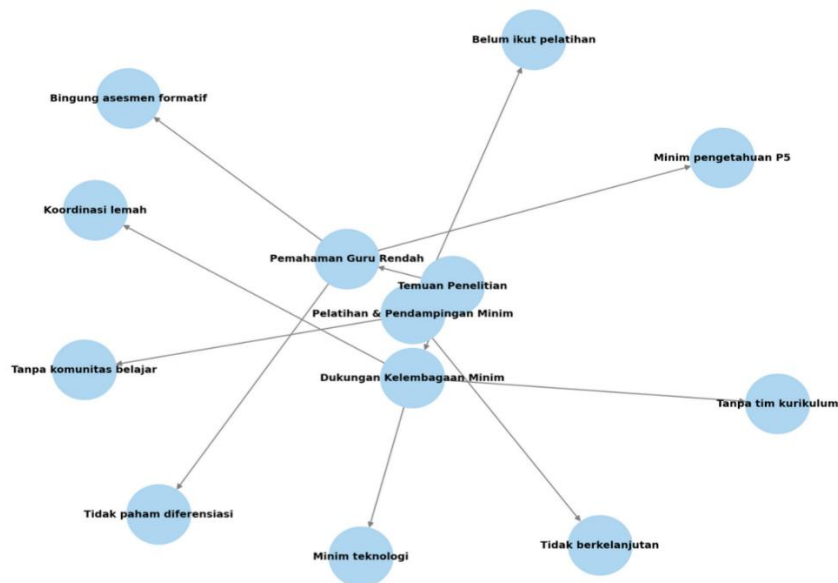
karena minimnya pelatihan praktik dan dukungan kelembagaan. Kondisi ini diperparah oleh kendala implementasi kurikulum sering kali terkait langsung dengan kesiapan kelembagaan di tingkat sekolah, termasuk kurangnya pelatihan berbasis praktik dan dukungan teknologi (Puspitasari & Utami 2023). Jika diulang dan diperkuat, kebutuhan guru akan peningkatan kapasitas melalui pelatihan kontekstual dan dukungan kelembagaan menjadi sangat mendesak agar Kurikulum Merdeka dapat diaktualisasikan dalam praktik pembelajaran yang nyata dan adaptif.

3. Kurangnya Akses terhadap Pelatihan dan Pendampingan Teknis

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pelatihan yang diberikan kepada guru SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu masih bersifat umum, terbatas durasinya, dan tidak berkelanjutan. Tidak adanya forum diskusi atau komunitas belajar di tingkat sekolah membuat guru sulit merefleksikan praktik sehari-hari dan berbagi strategi pembelajaran. Beberapa guru bahkan menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan langsung mengenai asesmen diagnostik atau pelaksanaan proyek karakter, sehingga mereka cenderung mencari materi secara mandiri dari internet atau media lain yang belum tentu relevan dengan konteks lokal. Studi Hartati dan Nugroho tahun 2023 menguatkan hal ini, menyebutkan bahwa banyak program pelatihan guru dalam konteks Kurikulum Merdeka belum menyentuh aspek praktis di lapangan dan lebih bersifat administrasi atau sosialisasi belaka (Hartati & Nugroho 2023). Akibatnya, guru perlu inisiatif sendiri untuk mengisi kekosongan praktis tersebut.

Kondisi ini memerlukan intervensi dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam merancang model pelatihan yang lebih aplikatif, berkelanjutan, dan kontekstual. Salah satu model yang diterapkan melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah pelatihan pembelajaran inovatif bersifat service-training. Studi Wahira bersama kawan-kawan, mencatat bahwa meskipun pelatihan semacam ini berhasil meningkatkan pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, banyak kendala waktu dan cakupan materi yang terlalu luas sehingga pelatihan hanya berhenti di tahap sosialisasi tanpa diimplementasikan lebih lanjut di kelas (Wahira, Rohartati, & Susanti 2023). Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan segera diikuti pendampingan lanjutan dan forum refleksi sebagai sarana memperdalam praktik guru.

Sebagai alternatif, pembentukan jejaring komunitas belajar antar guru, terutama di kalangan sekolah swasta di Palu, dapat memperkuat peningkatan kapasitas secara kolektif. Komunitas ini dapat menjadi wadah bagi guru untuk berbagi pengalaman, menyusun modul ajar kontekstual, dan melakukan refleksi bersama terhadap strategi pembelajaran berbasis proyek dan asesmen diagnostik. Model ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme sosial, khususnya teori zone of proximal development yang menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa scaffolding merupakan dukungan terstruktur dari pihak yang lebih kompeten yang berperan penting dalam mendorong kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar (Raslan 2024). Dengan adanya komunitas belajar, guru tidak hanya menerima transfer pengetahuan, tetapi juga memperoleh dukungan sosial dan kolaboratif dalam menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai karakter peserta didik dan konteks lokal sekolah.



Gambar 1.

Diagram Tematik Temuan

Sumber: Data penelitian lapangan di SMP IT Bina Islam, Palu (2025).

Solusi atas Permasalahan dan Kontribusi Penelitian



Gambar 2.

Bagan Tematik Implementasi Kurikulum Merdeka

Sumber: Data penelitian lapangan di SMP IT Bina Islam, Palu (2025).

Untuk menjawab tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu, dibutuhkan pendekatan strategis yang menasar tiga aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman guru, penguatan dukungan kelembagaan, dan pengembangan pelatihan berkelanjutan. Pertama, pelatihan guru harus difokuskan pada praktik langsung, termasuk pendampingan dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi, asesmen formatif, dan proyek P5. Kedua, kelembagaan sekolah perlu diperkuat melalui

pembentukan tim kurikulum internal dan sistem koordinasi yang mendukung. Ketiga, diperlukan model pelatihan aplikatif berbasis komunitas belajar yang mengedepankan refleksi bersama, adaptasi lokal, serta keterlibatan aktif guru dalam forum kolaboratif. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus turut serta sebagai fasilitator dan penyedia sumber daya, sehingga proses transformasi pendidikan berjalan secara sistemik dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam pembelajaran kontekstual dan transformatif. Namun demikian ditemukan bahwa sebagian guru telah menunjukkan keinginan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan pendekatan baru yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka. Inisiatif untuk mengikuti pelatihan dan membangun kerja sama antar guru mulai terlihat meskipun masih terbatas. Keunikan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada konteks lokasi dan jenis institusi pendidikan yang dikaji. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada sekolah negeri di kota besar, sementara penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai kondisi di sekolah swasta di wilayah berkembang. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang lebih inklusif, realistis, dan relevan dengan tantangan lokal.

Tabel 2.
Rekomendasi Solutif Berdasarkan Temuan Penelitian

No	Kategori Temuan	Indikator Tematik
1	Rendahnya Pemahaman Guru	Pelatihan praktik menyusun modul ajar berdiferensiasi, asesmen formatif, dan proyek P5.
2	Lemahnya dukungan kelembagaan	Pembentukan tim kurikulum internal dan penguatan sistem koordinasi sekolah.
3	Minimnya pelatihan dan pendampingan	Pengembangan model pelatihan berbasis komunitas belajar, forum refleksi guru, dan pendampingan pasca pelatihan.

Sumber: Data penelitian lapangan di SMP IT Bina Islam, Palu (2025).

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Tiga permasalahan utama yang teridentifikasi yaitu: rendahnya pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, lemahnya dukungan kelembagaan, serta terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Pertama, banyak guru belum memahami secara utuh prinsip pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila. Kedua, secara kelembagaan, sekolah belum memiliki sistem manajerial yang mendukung implementasi kurikulum secara efektif, termasuk dalam hal penguatan struktur organisasi kurikulum dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Ketiga, pelatihan yang diterima guru bersifat umum dan tidak berkelanjutan, serta minimnya forum refleksi kolektif menyebabkan guru kesulitan mengadaptasi pembelajaran dengan kebutuhan lokal.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh sinergi antara peningkatan kapasitas guru, reformasi kelembagaan sekolah, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan implementasi kurikulum perlu diarahkan pada konteks lokal dengan penguatan pelatihan berbasis praktik, komunitas belajar guru, dan sistem

kepemimpinan sekolah yang transformatif. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur yang selama ini lebih berfokus pada sekolah negeri dan unggulan, dengan menghadirkan realitas dari sekolah swasta kecil di daerah berkembang. Implikasi dari temuan ini sangat relevan untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.

REFERENCES

- Albers, B., Shlonsky, A., & Mildon, R. (2020). *Implementation Science 3.0*. Cham: Springer International Publishing.
- Alqahtani, T. M., Yusop, F. D., & Halili, S. H. (2023). Content validity of the Constructivist Learning in Higher Education Settings (CLHES) scale in the context of the flipped classroom in higher education. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-14. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01754-3>
- Butera, F., Batruch, A., Autin, F., Mugny, G., Quiamzade, A., & Pulfrey, C. (2021). Teaching as social influence: Empowering teachers to become agents of social change. *Social Issues and Policy Review*, 15(1), 128-151. <https://doi.org/10.1111/sipr.12072>
- Do, H.-N., Do, B. N., & Nguyen, M. H. (2023). How do constructivism learning environments generate better motivation and learning strategies? The design science approach. *Heliyon*, 9(12), e22734. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22734>
- Doh Nubia, W., & Blignaut, S. (2024). Rethinking curriculum implementation in time of COVID-19 and beyond: Lessons learnt from rural science teachers. *Curriculum Perspectives*, 44(1), 87-106. <https://doi.org/10.1007/s41297-023-00197-8>
- Hartati, M., & Nugroho, A. (2023). Evaluasi pelatihan guru kurikulum merdeka: Antara teori dan praktik. Kurikulum Merdeka. Hikam Media Utama.
- Holmes, K., Mackenzie, E., Berger, N., & Walker, M. (2021). Linking K-12 STEM pedagogy to local contexts: A scoping review of benefits and limitations. *Frontiers in Education*, 6, 693808. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.693808>
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan implementasi kurikulum merdeka. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Masava, B., Nyoni, C. N., & Botma, Y. (2022). Scaffolding in health sciences education programmes: An integrative review. *Medical Science Educator*, 33(1), 247-261. <https://doi.org/10.1007/s40670-022-01708-5>
- Raslan, G. (2024). The impact of the zone of proximal development concept (scaffolding) on the students problem solving skills and learning outcomes. In K. Al Marri, F. A. Mir, S. A. David, & M. Al-Emran (Eds.), *BUiD Doctoral Research Conference 2023, Lecture Notes in Civil Engineering*, 59–66. Cham: Springer Nature Switzerland.
- Thornhill-Miller, B., Camarda, A., Mercier, M., Burkhardt, J.-M., Morisseau, T., Bourgeois-Bougrine, S., Vinchon, F., et al. (2023). Creativity, critical thinking, communication, and collaboration: Assessment, certification, and promotion of 21st century skills for the future of work and education. *Journal of Intelligence*, 11(3), 54. <https://doi.org/10.3390/jintelligence11030054>
- Twining, P., Raffaghelli, C., Crook, Y., & Vogel, M. (2021). Educational change and the role of teachers: Reconceptualising teacher professionalism through curriculum reform. London: Routledge.

- Vaičiūnienė, A., & Kazlauskienė, A. (2022). Manifestation of Social Constructionism in the Process of Teaching and Learning. *Technium Social Sciences Journal*, 3(3), 245-258. <https://doi.org/10.47577/tssj.v3i3i1.6789>
- Wahira, D., Rohartati, H. M., & Susanti, A. (2023). Pelatihan Pembelajaran Inovatif Pada Kurikulum Merdeka Untuk Guru Sekolah Dasar Di Bontomarinra. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 89-95. <https://doi.org/10.47668/pkm.v3i2.234>
- Wijayanti, P. T., Rhamadani, N., Oktadika, U., Adiputra, M. J., & Sari, M. Y. (2025). Analisis Pemahaman Guru Terhadap Teori Konstruktivisme Pada Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 10(1), 34-42. <https://doi.org/10.33558/jpdk.v10i1.4567>
- Yuliana, Y. (2022). Kesiapan Guru Sekolah Negeri Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(2), 123-135. <https://doi.org/10.26562/jpd.v8i2.3456>